

APA YANG SALAH DENGAN DEMOKRASI?

Irianto Wijaya | University of Indonesia, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The value of every social ideal, including democracy, is always determined by two criteria, coherence and applicability. The power of democracy to fulfill these criteria depends on its ability to solve two kinds of social problems, the normative and the factual problems. Scepticism toward democracy usually concerns its ability to handle the latter, in which there is an old Platonian challenge that it must deal with. Democracy would be able to answer the challenge satisfactorily as long as we recognize the distinction between procedural and substantive rationality.

Key Words:

- *Democracy*
- *Coherence*
- *Applicability*
- *Platonian Challenge*
- *The Normative-Factual Distinction*
- *Procedural Rationality*
- *Substantive Rationality*

*"We are good, perhaps a little too good, but we are also a little stupid; and it is this mixture of goodness and stupidity which lies at the root of our troubles."*¹

*"If politics is the art of the possible, political philosophy is the art of making politically possible the seemingly impossible."*²

Demokrasi sedang berada di pihak bertahan. Keyakinan bahwa ia telah gagal membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik semakin meluas hingga ke dunia akademis. Tidak jarang kita dengar seruan bahwa demokrasi itu tidak cocok dengan masyarakat kita; bahwa sudah saatnya kita mencari "alat" yang lebih baik daripada demokrasi untuk merealisasikan segala hal yang kita anggap bernilai dalam hidup ini.

Sayangnya, apa yang dianggap sebagai sumber masalah dari demokrasi masih jauh dari jelas. Seringkali orang terjebak pada apa yang dinamakan Gilbert Ryle sebagai *category-mistake*, yaitu apa yang dipermasalahkan orang dari demokrasi sesungguhnya hanyalah problem pada format institusi-institusi yang biasa dipraktikkan di negara-negara yang disebut "demokratis." Ini adalah kekeliruan berpikir yang serupa dengan kecerobohan orang yang langsung mengklaim bahwa anggur Bordeaux itu tidak enak karena ia baru saja mencicipi anggur tidak enak yang berasal dari botol berlabel Bordeaux.

Demokrasi pada intinya adalah suatu ideal akan tatanan sosial, dan jika memang ia bermasalah, maka harus ditunjukkan bahwa ia bermasalah sebagai suatu ideal. Setiap ideal sendiri hanya dimungkinkan untuk memiliki, paling banyak, dua jenis problem. Problem jenis pertama adalah masalah "koherensi," yakni tentang kesesuaian antara ideal itu dan nilai atau ide normatif lain yang kita pegang. Sedangkan, jenis masalah satunya lagi adalah soal "aplikabilitas," yaitu mengenai dapat-tidaknya ideal itu diaktualisasikan dalam kehidupan ini, dan, walaupun bisa, seberapa besar ongkosnya? Pertanyaan kita sekarang adalah di manakah sekiranya letak masalah dari demokrasi?

Karena saya tidak dapat menemukan jawaban jelasnya dari mereka yang selama ini justru meneriakkan keterbatasan demokrasi, maka saya kira tidak ada salahnya jika saya, orang yang pro terhadap demokrasi, sendirilah yang coba menggantinya. Meskipun posisi awal saya sudah jelas berpihak, tetapi ini tidaklah menutupi kemungkinan bagi analisis yang objektif, di mana tentunya anda semua dapat menilai sendiri nanti.

Pertama-tama kita perlu tahu apa isi dari ideal demokrasi. Jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu bahwa *otoritas tertinggi dalam pengaturan sosial*

haruslah ditentukan oleh kesepakatan bersama. Singkatnya, demokrasi adalah *government by agreement*. Implisit pada poin itu terkandung rekognisi akan kesetaraan hakiki antar-manusia; bahwa tidak ada orang yang ditakdirkan superior ataupun inferior dari orang lain, sehingga dengan sendirinya tidak ada alasan yang bisa membenarkan orang untuk mengontrol secara paksa kehidupan orang lain. Setiap konflik kepentingan pun harus diselesaikan melalui akal sehat; bukan kekerasan.

Apakah hal itu menunjukkan optimisme yang tidak realistis tentang manusia? Ya memang bisa jadi, tapi hanya jika yang dimaksud oleh demokrasi adalah bahwa *semua manusia pasti selalu mengutamakan akal sehatnya*. Akan tetapi, bukan itu poin yang dipegang demokrasi, melainkan bahwa *semua manusia harus selalu mengutamakan akal sehatnya*. Oleh karena itu, jika mau dipersoalkan, maka yang harus dipersoalkan adalah "keharusan" itu. Namun, apakah keharusan itu bisa dipersoalkan? Saya kira kondisi moral yang kita semua hidupi saat ini tidaklah memungkinkan kita untuk secara serius menyerang imperatif tersebut. Bukannya berarti kita sekarang sudah punya alasan yang konklusif untuk mendukung imperatif itu, melainkan bahwa imajinasi kita saat ini tidak lagi sanggup terpesona dengan penolakan terhadapnya. Kondisi ini dapat ditemukan pada pengakuan Karl Popper berikut ini, "*I fully admit that I cannot rationally prove it. I frankly confess that I choose rationalism because I hate violence, and I do not deceive myself into believing that this hatred has any rational grounds.*"³

Tentu akan sangat terburu-buru jika kita kemudian langsung menyimpulkan bahwa tidak ada yang salah dengan demokrasi. Makna demokrasi masih perlu diselami lebih jauh. Kita dapat mulai dengan memperhatikan apa menjadi objek kesepakatan bersama itu.

Konflik kepentingan hanya mungkin berurusan dengan dua jenis problem, yaitu antara problem normatif ataupun problem faktual yang berhubungan dengan pemenuhan norma-norma itu. Perlu diperhatikan bahwa seringkali distingsi di antara keduanya menjadi kabur karena, dalam percakapan sehari-hari, perdebatan yang sebetulnya bersifat faktual sering menggunakan ekspresi yang berbentuk normatif, misalnya pada perdebatan apakah anda "harus" berhenti merokok atau tidak supaya bisa sehat. Yang dipersoalkan di sini sesungguhnya bukanlah norma, melainkan fakta, yakni soal apakah merokok memang pasti berbahaya bagi kesehatan, sehingga menghindari rokok merupakan sarana (*mean*) yang harus diambil untuk mencapai tujuan kesehatan. Bukan ini yang saya maksud dengan problem normatif. Meminjam distingsi Kant, bisa

dikatakan bahwa “normatif” yang dimaksud adalah masalah norma yang bekerja secara kategoris; bukan hipotetis.

Jadi, yang menjadi objek pertikaian sosial ada dua jenisnya, dan ideal demokrasi melihat bahwa kedua-duanya hanya boleh dipecahkan melalui kesepakatan sosial. Selama ini memang refleksi soal demokrasi cenderung hanya memperhatikan persoalan kesepakatan yang pertama, yaitu mengenai yang normatif. Tampaknya ada suatu praduga di kalangan intelektual pro demokrasi yang isinya dapat dilihat pada kata-kata Isaiah Berlin berikut ini, “*where ends are agreed, the only questions left are those of means, and these are not political but technical.*”⁴ Dengan kata lain, diyakini bahwa tantangan terbesar bagi demokrasi adalah soal pertikaian perihal yang normatif, sedangkan pertengkarannya tentang fakta adalah problem yang remeh-temeh, dalam arti dapat diselesaikan dengan mudah; tanpa perlu dilakukan teorisasi yang terlalu serius.

Akan tetapi, kalau kita memperhatikan pertengkarannya-pertengkarannya sosial berkepanjangan yang aktual terjadi di sekitar kita; pertengkarannya yang tidak sekedar beredar di dunia akademis, maka justru akan kelihatan bahwa yang umumnya diperdebatkan sebenarnya adalah masalah sarana-sarana. Perihal norma-norma kategoris, khususnya yang menyangkut *summum bonum* (nilai tertinggi), orang justru cenderung mudah untuk bersepakat.⁵ Kita bisa lihat bahwa mereka yang biasa kita sebut fundamentalis pun, dalam mempromosikan suatu hal yang dibenarkan oleh ayat-ayat agamanya untuk diberlakukan secara mutlak bagi semua orang, misalnya soal pengaturan tata busana perempuan, selalu mempromosikannya sebagai sarana untuk merealisasikan suatu prinsip normatif yang sudah disepakati bersama, seperti kesejahteraan atau keamanan.

Karena pertengkarannya berkepanjangan yang nyata itu justru terabaikan di dalam diskursus tentang demokrasi, maka tak heran jika ketidakpuasan terhadap demokrasi semakin meluas. Kesepakatan bersama akan prinsip-prinsip normatif yang mendasar menjadi sia-sia ketika tidak dapat dilakukan kesepakatan soal bagaimana caranya untuk merealisasikan prinsip-prinsip itu. Tetapi, hal ini barulah menunjukkan adanya yang salah dengan bagaimana demokrasi itu didiskusikan selama ini, yaitu bahwa *perhatian hanya diberikan terhadap solusi bagi pertengkarannya soal yang normatif, padahal apa yang lebih mendesak adalah rumusan solusi bagi pertengkarannya akan yang faktual.* Demokrasi sendiri belum tentu bermasalah. Ia baru bisa disebut bermasalah pula jika dan hanya jika solusi bagi pertengkarannya faktual itu ternyata memang tidaklah

dimungkinkan di dalam kerangka pikirnya, sebab ini menunjukkan bahwa demokrasi itu, meski indah, tapi *unattainable*.

Solusi itu sendiri sebetulnya mudah untuk terpikirkan, yaitu bahwa penyelesaian dari pertengkarannya itu sendiri terletak pada kesepakatan. Kalau untuk urusan normatif kita bisa percaya bahwa kesepakatan dimungkinkan karena adanya *reasonableness* (akal sehat) pada diri manusia, yaitu karena pada orang terdapat kemampuan untuk merumuskan nilai-nilai kehidupan bersama yang masuk akal tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang lain, maka untuk urusan faktual pun kesepakatan itu juga dimungkinkan sebab ada *rationality* (rasionalitas) pada manusia, yaitu kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kekeliruan. Singkat kata, akal budi (*reason*) memungkinkan kita untuk memiliki baik *reasonable agreement* maupun *rational agreement*.⁶

Hanya saja, elaborasi yang mendalam baru pernah dilakukan terhadap maksud dari *reasonable agreement*, di mana John Rawls merupakan pionirnya. Tidak demikian adanya dengan *rational agreement*. Hal ini pun mengundang suatu kecurigaan, yaitu bahwa mungkinkah “kesepakatan rasional” itu sebenarnya hanya omong kosong belaka? Kubu otoritarian biasanya mengeksploitasi habis-habisan kecurigaan itu dengan terus menekankan bahwa demokrasi sebetulnya impoten untuk mengatasi pertengkarannya faktual antar-individu.

Impotensi itu dapat coba dibuktikan dengan meminjam serangan posmodernisme terhadap rasionalitas, yakni bahwa yang menjadi sumber harapan demokrasi, yaitu “rasionalitas,” sebetulnya selalu tertanam secara sosial (*socially embedded*). Apa yang menjadi acuan utama rasionalitas, yaitu “fakta,” juga selalu didefinisikan oleh konstruksi sosio-historis tertentu. Kalau begini, adalah mustahil untuk menyelesaikan perdebatan faktual melalui rasionalitas; dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada, mengingat masing-masing pihak memiliki versi rasionalitasnya sendiri-sendiri. Poinnya di sini adalah bahwa rasionalitas tidak akan dapat membawa kita pada kesepakatan.

Tentu jalan pikiran posmodernisme tidak sepenuhnya menutup ruang kemungkinan bagi lahirnya kesepakatan itu. Kemungkinan itu ditunjukkan, misalnya, oleh Richard Rorty, di mana menurutnya yang perlu kita lakukan adalah “*reduce objectivity to solidarity.*”⁷ Maksudnya adalah di dalam perdebatan faktual kita tidak lagi bisa menyandarkan argumen kita pada “fakta-fakta objektif,” tetapi harus pada “rasa sosial” yang beredar dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang harus dilakukan

di dalam perdebatan faktual bukanlah mendemonstrasikan bahwa keyakinan kita itu adalah yang paling dekat dengan fakta (yang paling mungkin “benar”) dari seluruh stok keyakinan yang tersedia, melainkan menunjukkan bagaimana keyakinan kita itu merupakan keyakinan yang paling mungkin untuk diterima oleh semua pihak dalam masyarakat. Kerja “rasionalitas” di sini menjadi tak ada bedanya dengan kerja *reasonableness*.

Hanya saja, kubu otoritarian tadi dapat menerima kemungkinan itu tanpa masalah. Kemungkinan itu hanya mampu menunjukkan bahwa kesepakatan sosial memang bisa terjadi untuk urusan faktual, tetapi ia tidak mampu menerangkan mengapa kesepakatan semacam itu bernilai; mengapa kita harus bersepakat. Kesepakatan itu tidaklah menjamin lahirnya putusan yang lebih dekat dengan fakta (lebih mungkin benar). Lalu untuk apa? Apakah untuk memperkuat rasa keterikatan sosial? Mungkin saja, tetapi ada dua poin yang harus dicatat.

Pertama, sangat pantas untuk diragukan apakah kesepakatan untuk urusan faktual memang merupakan suatu syarat niscaya bagi keutuhan suatu komitmen sosial; lain halnya dengan urusan normatif. Kedua, demokrasi, sebagaimana setiap mekanisme politik di dunia ini, pasti bekerja dengan *time-constraint*, di mana keputusan harus diambil dalam limit waktu tertentu. Metode demokrasi, yaitu kesepakatan sosial, tidak dapat diandalkan untuk menepati limit itu, apalagi di dalam masyarakat dengan jumlah anggota yang sangat besar. Kombinasi dari kedua poin ini merupakan senjata yang cukup ampuh untuk menyerang demokrasi, yakni karena nilai tambah yang diberikannya tidak terlalu bernilai, padahal ongkosnya besar, maka menjadi sah jika kita mencari metode yang lebih efisien daripada yang disediakan oleh demokrasi.

Jadi, kubu otoritarian dapat menyimpulkan bahwa, untuk urusan faktual, demokrasi hanya bisa antara gagal atau inefisien. Kesimpulan ini tak bisa dihindari ketika rasionalitas tidak lagi dipandang sebagai “penghubung” kita kepada realitas yang objektif; kepada apa yang disebut Charles Sanders Peirce sebagai *external permanency*, yaitu “*something upon which our thinking has no effect*,” dan bersifat publik.⁸ Tetapi, hanya dilihat sebagai sarana bagi kita untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Namun, apa alasannya bagi kita untuk menerima konseptualisasi tentang rasionalitas semacam ini? Jawaban paling masuk akal yang bisa diberikan adalah bahwa memang *there's nothing out there*; tidak ada “realitas” di luar komunitas; di luar diskursus kita, manusia. Tampak bagaimana implisit pada jalan pikiran ini terkandung ontologi bahwa yang namanya

“realitas” itu sepenuhnya bergantung pada daya psikis kita.

Akan tetapi, di luar komunitas akademis tertentu, saya yakin hampir tidak ada orang yang kewarasannya mengizinkan dia untuk memeluk nihilisme epistemologis semacam itu. Orang umumnya tidak bisa menyangkal keberadaan realitas objektif itu di dalam hidupnya, di mana segala perencanaan tentang apa yang akan ia lakukan dibuat berdasarkan perhitungan yang teliti akan tata kerja realitas objektif tersebut. Penjelasan atas fenomena ini tidaklah terlalu rumit. Dalam usaha merealisasikan apapun tujuan ataupun keinginan kita, suatu kalkulasi mau tak mau harus kita lakukan, yaitu memastikan apakah tindakan kita ini memang cara terbaik untuk memenuhi tujuan/keinginan tersebut. Pengertian “terbaik” itu sendiri ditentukan dari dua aspek, yakni, pertama, diukur dari tingkat probabilitas kesuksesan dari tindakan itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan, kedua, “ongkos” yang diberikan oleh tindakan itu bagi kita. *Semua kalkulasi ini hanya menjadi relevan untuk dilakukan kalau memang realitas objektif itu ada.*

Dengan menggunakan ide posmodernisme sebagai amunisi, serangan yang dilancarkan kepada demokrasi memang bisa sangat fatal, tapi hanya jika orang-orang memang memegang prinsip “tiada realitas di luar komunitas.” Masalahnya, sebagaimana telah kita lihat di atas, adalah sedikit sekali orang yang mau serius hidup dengan gagasan nihilistik tersebut (bahkan, mungkinkah sebetulnya tidak ada yang mau menghidupinya?). Rasionalitas kita semua lihat sebagai sarana untuk menentukan solusi yang terbaik; solusi yang bergantung pada akurasi pengetahuan kita tentang kinerja dari realitas yang objektif. Oleh karena itu, kubu otoritarian tidaklah bisa mengandalkan serangan yang eksentrik tersebut untuk membuktikan kesalahan demokrasi.

Demokrasi sendiri belumlah sepenuhnya “aman” dari masalah, karena kubu otoritarian dapat menggunakan strategi ofensif yang baru. Ia kini mengakui bahwa fungsi rasionalitas adalah terus-menerus mendekatkan kita pada kebenaran, di mana pengetahuan yang benar itu esensial perannya bagi kesuksesan kita untuk menggapai apa saja yang kita mau, termasuk pemenuhan dari prinsip-prinsip normatif yang sudah kita sepakati sebagai prinsip dasar kehidupan sosial. Tetapi, ia melihat bahwa jawaban yang rasional dari perdebatan faktual itu tidak akan bisa disediakan oleh demokrasi; oleh kesepakatan sosial.

Alasannya, menurut kubu otoritarian, cukup jelas. Pertama-tama terdapat ketidaksetaraan pada kapasitas nalar antar manusia. Apa signifikansi dari fakta ini? Sebenarnya sederhana, solusi yang baik bagi

problem sosial yang faktual hanya dapat diperoleh melalui kegiatan nalar (*reasoning*) yang serius, dan bernalar selalu merupakan kegiatan yang mengakibatkan pengorbanan sumber-sumber daya tertentu, khususnya waktu dan energi. Mereka dengan kapasitas nalar yang tinggi dapat melakukan kegiatan itu secara lebih baik dan juga dengan pengorbanan yang lebih sedikit. Di sisi lain, kehidupan tidaklah terdiri dari kebutuhan sosial semacam itu saja. Setiap orang juga memiliki kebutuhan individual, entah bersifat psikis ataupun fisik, yang tidak bisa tidak dipenuhi.

Kalau begitu, tentu akan jauh lebih baik bila urusan yang pemecahannya membutuhkan *hard reasoning* diserahkan saja pada mereka yang mampu mengatasinya dengan pengorbanan waktu dan tenaga yang paling minimal. Mereka jadi akan punya sisa waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan psikis lainnya, seperti *intimacy* atau *sublimity*, sedangkan kebutuhan fisik mereka nantinya akan diurus oleh orang-orang yang kemampuan nalarnya tidak terlalu baik. Orang-orang yang kapasitas nalarnya tidak tinggi berkonsentrasi saja dengan produksi sumber-sumber daya fisik. Dengan demikian, cara untuk merealisasikan prinsip-prinsip normatif yang telah disepakati bersama tidaklah perlu ditentukan oleh suatu kesepakatan sosial, tetapi cukup oleh pendapat sekelompok orang istimewa; para “pakar.” Pikiran ini merupakan tantangan klasik bagi demokrasi; tantangan yang dapat ditelusuri awal mulanya pada *The Republic*-nya Plato.

Naasnya, cukup banyak proponent demokrasi yang tampaknya tidak menangkap poin utama dari tantangan itu. Mereka langsung menuduh bahwa pembagian kerja Platonian itu membenarkan dominasi sekelompok orang terhadap orang-orang lainnya. Padahal, yang sebetulnya akan terjadi, di dalam skema ideal pembagian kerja itu, adalah “bantuan,” bukan “dominasi.” Sebagai ilustrasi, perhatikanlah kerja seorang kasir. Setiap saat ia harus menghitung dengan tepat berapa uang yang harus diterima dan berapa yang harus dikembalikan pada konsumen. Kalau ia harus menghitung sendiri semua itu tentu ia akan cepat kewalahan. Untunglah ia tidak perlu melakukan itu, sebab ada kalkulator yang dapat melakukannya secara jauh lebih cepat dan tepat. Akan sangat menggelikan jika dikatakan bahwa kalkulator itu “mendominasinya.”

Peran para pakar di dalam skema pembagian kerja di atas pun secara ideal sama saja dengan peran kalkulator tersebut bagi si kasir. Namun, sebagian proponent demokrasi masih merasa keberatan dengan ada peran semacam itu, sebab menurutnya yang harus dilakukan bukanlah

membiarkan orang-orang itu hidup dalam ketidaktahuan, melainkan justru melatih dan mengembangkan rasionalitas mereka dengan turut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan sosial. Bahkan, menurut sebagian proponent demokrasi yang biasa dinamakan kaum “demokrasi deliberatif” (*deliberative democracy*), di situlah letak keunggulan demokrasi. Demokrasi mendorong semua manusia untuk memberdayakan rasionalitas mereka untuk mengatasi problem-problem sosial. Poin ini diungkapkan dengan utuh oleh Karl Jaspers pada kata-katanya ini, “*the democratic idea has its ground in man's task of self-actualization in reason, and in the unique, irreplaceable character of every individual, and in his dignity based on his participation in reason.*”⁹

Hanya saja, seluruh harapan demokrasi deliberatif itu hanya bisa sungguh-sungguh bernilai di dalam dunia di mana tidak ada *time-constraint* dalam pemecahan problem-problem sosial dan tidak ada kebutuhan untuk memproduksi sumber-sumber daya yang lain. Singkat kata, harapan itu hanya bernilai kalau tidak ada kelangkaan (*scarcity*) di dunia yang kita hidupi ini, sehingga kita semua dapat dengan sabar saling bertukar pikiran dan yang 'kurang cerdas' perlahan-lahan dapat mengembangkan diri hingga akhirnya kita semua sampai pada suatu solusi rasional yang disepakati bersama untuk tiap-tiap problem. Jelas kita hidup tidak di dunia semacam itu, dan inilah mengapa tantangan Platonian di atas menjadi sangat penting.

Demokrasi bukannya tidak sanggup mengatasi tantangan itu. Namun, untuk mengatasinya, yang harus dilakukan pertama-tama bukanlah mempertanyakan nilai dari skema ideal Platonian itu (kita akui bahwa pembagian kerja itu adalah solusi terbaik yang bisa kita miliki di dunia ini), melainkan mempertanyakan bagaimana caranya kita bisa mencapai kondisi ideal tersebut, yaitu tentang *bagaimana kita dapat mengetahui siapa saja yang memang punya kapasitas untuk masuk ke kelompok “orang-orang istimewa” itu dan bagaimana memastikan bahwa mereka tidak akan menggunakan kelebihan mereka itu untuk memanipulasi orang-orang lainnya demi memaksimalkan keuntungan pribadi mereka.*

Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada persoalan “**rasionalitas prosedural**” (*procedural rationality*), yaitu penentuan prosedur-prosedur umum yang memandu proses pembuatan keputusan mengenai problem sosio-faktual, di mana prosedur-prosedur itu memberikan jaminan yang maksimal bagi terciptanya keputusan yang paling rasional. Demokrasi sekarang dapat menjawab tantangan Platonian tadi dengan menunjukkan bahwa hanya untuk masalah rasionalitas

prosedural inilah kesepakatan semua pihak itu wajib untuk diadakan. Serangan kubu otoritarian akan inefisiensi atau *rational-inferiority* dari demokrasi hanya relevan kalau memang demokrasi mewajibkan tiap-tiap keputusan sosial itu diambil melalui kesepakatan bersama antara semua anggota masyarakat.

Memang akan sangat berlebihan untuk menuntut semua orang supaya selalu mencurahkan energi dan waktunya untuk memeriksa rasionalitas dari masing-masing solusi sosial yang ditawarkan. Namun, demokrasi sebenarnya tidak perlu menuntut semua orang untuk masuk pada persoalan "**rasionalitas substantif**" (*substantive rationality*), yakni persoalan pengujian substansi/isi dari tiap-tiap proposal pemecahan masalah sosial. Ia cukup menuntut kita semua untuk berefleksi secara serius perihal rasionalitas prosedural. Serangan kubu otoritarian pun kehilangan kekuatannya, sebab ternyata, untuk urusan faktual, problem yang membutuhkan refleksi bersama hanya satu, yakni problem prosedural. Sumber daya sosial yang harus dipakai untuk satu problem itu pun tidak akan sebanyak yang dituduhkan oleh kubu otoritarian.

Selain itu, level pengetahuan dan kecerdasan yang menjadi syarat untuk bisa mengikuti diskusi soal rasionalitas prosedural itu tidaklah berlebihan, dan ini berarti kesepakatan sosial semakin dimungkinkan untuk terjadi tanpa ongkos yang signifikan. Kita tidaklah perlu menguasai kompleksitas fakta dan menjerumuskan diri dalam proses nalar yang rumit. Justru fungsi utama dari prosedur rasional adalah memungkinkan kita untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan tanpa harus paham akan tiap-tiap langkah pada prosesnya, atau, dengan kata lain, prosedur itu "menyederhanakan" fakta bagi kita.

Sebagai contoh, ketika kita sakit cukup keras, mengandaikan bahwa kita ini bukan dokter, maka yang akan segera kita lakukan bukanlah mendaftarkan diri ke program kuliah kedokteran ataupun membeli dan mempelajari berbagai buku teks kedokteran. Yang akan kita lakukan adalah memikirkan dokter atau rumah sakit manakah yang paling tepat untuk dikunjungi, di mana apa yang menjadi dasar pertimbangan kita adalah hal-hal yang sifatnya non-medis, seperti rekomendasi orang-orang sekitar kita, reputasi, ataupun penghargaan yang pernah diperoleh. Yang biasanya menjadi problem kita adalah memutuskan manakah di antara bahan pertimbangan itu yang paling signifikan, mana yang nomor dua pentingnya, mana yang nomor tiga, dan seterusnya, serta apa alasan dari pengurutan itu. Dengan kata lain, apa yang sedang menjadi persoalan bukanlah rasionalitas substantif dari pilihan kita, melainkan rasionalitas

proseduralnya. Segala solusi yang ditawarkan untuk problem prosedural itu pun merupakan solusi yang dapat dipahami dengan cukup mudah oleh kita semua. Ia tidak memerlukan adanya latar pengetahuan yang kompleks.

Jadi, *perbedaan demokrasi dan otoritarianisme sesungguhnya terletak pada pandangan mereka tentang penyelesaian dari problem rasionalitas prosedural; bukan problem rasionalitas substantif*. Demokrasi bisa saja menerima skema pembagian kerja Platonian tadi dalam hal penyelesaian masalah rasionalitas substantif, dan uraian di atas pun menunjukkan bahwa memang seharusnya demokrasi menerima itu. Skema pembagian kerja tersebut dapat dikatakan sebagai wujud nyata dari prinsip keadilan kedua Rawls; bahwa ia merupakan salah satu bentuk "ketidaksetaraan sosial yang menguntungkan semua pihak," di mana persyaratan dasar bahwa detail prosedural untuk skema Platonian itu haruslah prosedur-prosedur yang memang disepakati oleh semua pihak merupakan jaminan bagi prioritas dari prinsip keadilan pertama Rawls (prinsip *equal basic liberty*).¹⁰ Mengacu pada fakta sosiologis yang ada, tampak pula bahwa penggunaan skema Platonian itu memang sebenarnya sudah menjadi bagian dari prosedur-prosedur rasional yang disepakati secara demokratis di berbagai tempat.

Aturan-aturan yang selama ini memiliki "ikatan historis" yang sangat intim dengan ideal demokrasi, seperti tentang politik representasi, *majority rule*, periode jabatan, dan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers, sesungguhnya dapat dilihat sebagai prosedur-prosedur untuk menjamin supaya skema ideal Platonian itu benar-benar berjalan dalam menghadapi berbagai problem faktual pada masyarakat. Seseorang hanya bisa menjadi anggota dari "kelompok istimewa" atau sebut saja, kelompok "pembuat keputusan," ketika ia dipercaya memiliki kemampuan oleh sebanyak-banyaknya orang lain, dan ia harus terus menerus menunjukkan bahwa ia memang benar mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang rasional, sebab kedudukannya itu tidaklah bersifat abadi. Belum lagi adanya jaminan atas kebebasan berekspresi semua orang terhadap kinerja para pembuat keputusan sosial tidak hanya akan menjamin bahwa kemampuan si pembuat keputusan itu akan terus menerus disoroti dan diuji, namun juga akan menjamin adanya ruang bagi orang-orang baru untuk mempromosikan kemampuan mereka kepada publik; kemampuan untuk menjadi pembuat keputusan yang lebih baik daripada yang ada saat ini. Rasionalitas dari prosedur-prosedur seperti ini jelas dapat dipahami dan diukur oleh siapa saja.¹¹

Sekarang kita dapat melihat dan mengevaluasi wujud sejati dari lawan demokrasi, yaitu otoritarianisme. Baginya, rasionalitas prosedural pun harus ditetapkan oleh sekelompok orang saja; tidak semua. Apa alasan yang dapat diberikannya? Kubu otoritarian dapat kembali pada argumen awalnya, yaitu mengacu pada perbedaan kapasitas nalar manusia, maka sebetulnya baik untuk urusan substantif maupun prosedural tetap saja akan lebih tepat jika penentuannya diserahkan hanya pada mereka yang cerdas. Cara pandang inilah yang tampaknya sering mengganggu komitmen para intelektual terhadap demokrasi. Mereka sulit menyangkal bahwa mereka sering tidak puas dengan *general IQ* dari masyarakat; bahwa publik mudah sekali tertipu oleh berbagai omong kosong hanya karena “kemasan”-nya; bahwa dunia akan berjalan lebih baik kalau hanya merekalah yang berkuasa untuk membuat keputusan-keputusan sosial.

Kegelisahan para intelektual ini bukannya tidak berdasar sama sekali. Tetapi, sayangnya, mereka umumnya langsung tergugah untuk membuang demokrasi tanpa memperhatikan apa alternatif yang memang sungguh-sungguh tersedia. Rasionalitas prosedural itu, kalau tidak ditentukan oleh kesepakatan semua orang, maka ia hanya mungkin untuk ditentukan oleh mayoritas orang. Pilihan sekelompok kecil orang, sehebat apapun kecerdasannya, hanya dapat menjadi dasar tatanan sosial jika paling tidak sebagian besar anggota masyarakat itu menerima pilihan tersebut. Namun, hal ini berarti bahwa pilihan itu pada akhirnya juga harus tunduk pada level kecerdasan publik yang tadi dikatakan “biasa-biasa” saja.

Kalau begitu, otoritarianisme pun sebenarnya tidak memberikan jalan keluar bagi pesimisme kelompok intelektual di atas. Alasan yang dipakai sebagai justifikasi pun tidak lagi bisa dipertahankan, sebab ternyata cara yang dipakai otoritarianisme tidak akan bisa menghasilkan pilihan yang mencerminkan level kecerdasan yang istimewa. Bahkan, melalui alur berpikir ini, kita dapat lihat sekarang bahwa ada persoalan yang amat besar bagi otoritarianisme, yaitu *kalau pada akhirnya prosedur-prosedur yang menjadi dasar tatanan sosial itu adalah prosedur yang cukup sederhana untuk dipahami oleh orang-orang medioker, maka ini tentu berarti prosedur itu sebenarnya terbuka untuk disepakati oleh semua individu*. Lalu, mengapa otoritarianisme menolak kesepakatan sosial? Mengapa ia bersikeras untuk menyingkirkan aspirasi dari orang-orang tertentu? Di sini, saya percaya bahwa kubu otoritarian akan memilih untuk bungkam, karena jawaban yang masuk akal hanya satu, yaitu bahwa karena kita memang terobsesi untuk menguasai sekelompok orang itu, dan ini

bukanlah jawaban yang menyenangkan untuk didengar.

Di sisi lain, menganggap demokrasi sebagai suatu “keburukan yang tidak bisa dihindari” pun juga tidaklah tepat. Anggapan semacam itu hanya bisa lahir akibat kelemahan pada prosedur-prosedur rasional yang telah disepakati bersama, tetapi sesungguhnya tidak ada yang tidak bisa dihindari dari prosedur-prosedur itu. Demokrasi memungkinkan kita untuk memodifikasinya secara radikal, mengingat semua prosedur itu hanyalah alat untuk merealisasikan ideal demokrasi; untuk menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan sosial yang disepakati bersama. Sebagian orang mungkin mengira *procedural improvement* itu bisa sifatnya sangat terbatas. Namun, perkembangan mutakhir dari studi-studi *game theory* justru menunjukkan bahwa sesungguhnya ruang *improvement* itu masih sangatlah luas dan potensial untuk terus berkembang.

Ada tiga kriteria yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi rasionalitas prosedural. Pertama, melihat apakah suatu konstruksi prosedural akan memberikan peluang yang optimal bagi kita untuk bisa memilih orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi pembuat keputusan sosial, termasuk memberikan dorongan yang optimal kepada para calon pembuat keputusan sosial itu untuk menyediakan informasi yang detail kepada publik akan kualitas diri mereka. Kedua, mengamati apakah konstruksi prosedural itu akan memberikan dorongan optimal kepada para pembuat keputusan sosial untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang memang merupakan keputusan yang rasional untuk kepentingan publik; bukan keputusan yang bodoh ataupun licik. Yang terakhir, dan saya kira yang sangat penting, namun seringkali diabaikan, adalah memperhatikan apakah konstruksi prosedural tersebut meminimalisir kerugian yang akan kita derita kalau-kalau ternyata keputusan yang bodoh atau licik itu berhasil lolos dari “kekangan prosedural” (*procedural constraints*) yang telah kita upayakan.

Kriteria yang terakhir itu dapat dipahami sebagai suatu *insurance policy* yang harus dipikirkan mengingat secanggih apapun kekangan prosedural yang dibuat, selalu ada peluang bagi lolosnya keputusan yang keliru. Metode yang sederhana, tetapi sangat efektif, untuk meminimalisir kerugian itu adalah dengan meminimalisir luas wilayah kehidupan yang sah untuk diatur oleh para pembuat keputusan sosial tersebut. Singkatnya, *we minimize the state*. Aspek-aspek kehidupan yang sanggup dijalankan sendiri oleh individu tidaklah boleh diintervensi negara.

Dari situ, kita bisa lihat bagaimana hak-hak negatif (*negative rights*) individu yang selama ini ditetapkan sebagai hak dasar manusia, misalnya

hak untuk beragama, sesungguhnya selain dapat dipahami secara deontologis (sesuatu yang bernilai secara intrinsik bagi semua orang), tetapi juga sah untuk dipahami secara instrumental (sebagai batasan yang melindungi kita semua dari kebodohan atau kelicikan mereka yang duduk sebagai pembuat keputusan sosial). Begitu pula dengan pentingnya distingsi antara ranah privat dan ranah publik.¹²

Sayangnya, kita di Indonesia cenderung mengambil begitu saja berbagai konstruksi prosedural yang telah diberlakukan di negara-negara lain yang demokratis; kemudian melakukan berbagai pemilahan dan kombinasi supaya seolah-olah itu menjadi “milik kita,” tanpa kita pahami betul rasionalitas yang bekerja di balik prosedur-prosedur itu. Ketiga kriteria rasionalitas sederhana yang luar biasa vital di atas justru tidak diberikan perhatian yang serius. Hal ini kelihatan sekali, misalnya, pada format desentralisasi pemerintahan yang masih kita pakai, di mana kriteria kedua dan ketiga jelas-jelas diabaikan, sehingga bisa muncul peraturan-peraturan daerah yang justru melanggar hak-hak dasar individu. Ironisnya, peraturan daerah semacam itu suka memakai demokrasi sebagai tameng, dan orang pun kemudian jadi menyalahkan demokrasi. Padahal, demokrasi, atas pijakannya pada rasionalitas kita semua, sesungguhnya tidak mungkin bisa menerima hal itu.

Akhir kata, setelah diskrutinisasi, ternyata pada demokrasi sendiri tidak dapat ditemukan adanya masalah, baik dilihat dari aspek koherensi maupun aplikabilitas. Ada pun yang bermasalah adalah pada cara penyampaian dan pembelaannya selama ini. Namun, kalau begitu, yang harus ditinggalkan hanyalah cara-cara usang tersebut, bukan ideal demokrasi itu sendiri.

Catatan:

1. Popper, Karl. 1963. *Conjectures and Refutations*. London: Routledge and Kegan Paul Limited. Hlm. 365.
2. Hayek, F. A. 1999. *The Constitution of Liberty*. London: Routledge. Hlm. 114.
3. *Op.cit.* Hlm. 357.
4. Berlin, Isaiah. “Two Concepts of Liberty.” Dalam Hardy, H. (ed.). 2002. *Liberty*. Hlm. 166.
5. Saya tidak memungkirkan bahwa masih ada berbagai isu normatif yang masih menjadi bahan perdebatan berkepanjangan seperti pada masalah aborsi atau *euthanasia*. Akan tetapi, saya menduga bahwa

yang menjadi sebab utama mengapa perdebatan itu berlarut-larut adalah adanya luapan emosi yang sangat berlebihan dari masing-masing pihak terhadap isu itu, sehingga apa yang menjadi poin utama dari klaim tiap-tiap pihak menjadi kabur. Namun, terlepas dari benar-salahnya dugaan saya itu, fakta bahwa ada beberapa isu normatif yang masih terus diperdebatkan ini juga tidaklah berdampak fatal bagi demokrasi, karena selama untuk isu normatif yang paling utama; yang paling definitif sifatnya bagi komitmen kita terhadap suatu institusi sosial; kita dapat bersepakat, maka demokrasi tetap bisa bekerja. Dengan kata lain, kita tidaklah membutuhkan kesepakatan antar-individu yang *lengkap* akan seluruh isu normatif yang ada di dunia; kesepakatan yang *parsial* saja bisa cukup. Poin ini pernah disampaikan pula oleh Amartya Sen, khususnya pada kata-katanya ini, “*the 'pragmatic reason for incompleteness' is to use whatever parts of the ranking we manage to sort out unambiguously, rather than maintaining complete silence until everything has been sorted out and the world shines in dazzling clarity.*” Lih. Sen, Amartya. 1995. *Inequality Reexamined*. Cambridge: Harvard University Press. Hlm. 49.

6. “Akal budi” di sini dipahami semata-mata sebagai keseluruhan daya yang dimiliki manusia untuk memecahkan masalah-masalahnya. Jadinya, pertentangan antara akal dan emosi, atau akal dan intuisi, yang sering ditemukan pada literatur lain, tidaklah relevan untuk diberlakukan di sini.
7. Lih. Rorty, Richard. 1991. *Objectivity, Relativism, and Truth*. Hlm. 22.
8. Lih. Peirce, Charles Sanders. “The Fixation of Belief.” Dalam Menand, Louis (ed.). 1997. *Pragmatism: A Reader*. Hlm. 21. Tentang sifat publik itu diterangkan lebih jauh oleh Peirce sebagai berikut, “*our external permanency would not be external, in our sense, if it was restricted in its influence to one individual. It must be something which affect, or might affect, every man.*”
9. Lih. Jaspers, Karl. “The Future of Mankind.” Dalam Stephen Eric Bronner (ed.). 1997. *Twentieth Century Political Theory: A Reader*. London: Routledge. Hlm. 36.
10. Penjelasan yang mendalam akan dua prinsip keadilan Rawls itu dapat dilihat pada Rawls, John. 1995. *A Theory of Justice*. London: Belknap Press. Hlm. 302-303.
11. Penerimaan atas prosedur-prosedur itu otomatis membuat demokrasi berjalan serupa dengan proses pasar, sebagaimana diakui dan dikembangkan oleh orang-orang seperti Joseph Schumpeter, James

Buchanan, dan Richard Posner. Namun, tak jarang yang merasa terganggu oleh penggambaran seperti itu tentang demokrasi. Amy Gutmann misalnya, berpendapat bahwa penggambaran semacam itu adalah “*the least inclusive and the least inspiring conception that have general currency in contemporary political theory.*” Lih. Gutmann, Amy. “Democracy.” Dalam Goodin, Robert and Pettit (ed.). 1993. *A Companion to Contemporary Political Philosophy*. Hlm. 412. Akan tetapi, sinisme semacam itu hanya bisa lahir akibat ketidakjelian dalam melihat rasionalitas yang bekerja di balik kondisi demokrasi tersebut.

12. Pada masyarakat yang baru mulai mengenal demokrasi; yang baru mulai mencerna konsep hak-hak individual, menggunakan pemahaman instrumental itu akan jauh lebih efektif untuk menghasilkan penerimaan sosial. Sangatlah sulit untuk mengharapkan orang dapat begitu saja menerima nilai-nilai baru yang diperkenalkan kepadanya langsung sebagai nilai yang fundamental. Orang umumnya harus tahu dulu signifikansi positif dari nilai-nilai baru itu bagi kehidupannya supaya bisa menerimanya.

Daftar Pustaka :

1. Berlin, Isaiah. “Two Concepts of Liberty.” Dalam Hardy, H. (ed.). 2002. *Liberty*. USA: Oxford University Press.
2. Gutmann, Amy. “Democracy.” Dalam Goodin, Robert and Pettit (ed.). 1993. *A Companion to Contemporary Political Philosophy*. Oxford: Blackwell Publishers.
3. Hayek, F. A. 1999. *The Constitution of Liberty*. London: Routledge.
4. Jaspers, Karl. “The Future of Mankind.” Dalam Stephen Eric Bronner (ed.). 1997. *Twentieth Century Political Theory: A Reader*. London: Routledge.
5. Peirce, Charles Sanders. “The Fixation of Belief.” Dalam Menand, Louis (ed.). 1997. *Pragmatism: A Reader*. USA: Vintage Books.
6. Popper, Karl. 1963. *Conjectures and Refutations*. London: Routledge and Kegan Paul Limited.
7. Rawls, John. 1995. *A Theory of Justice*. London: Belknap Press.
8. Rorty, Richard. 1991. *Objectivity, Relativism, and Truth*. USA: Cambridge University Press.
9. Sen, Amartya. 1995. *Inequality Reexamined*. Cambridge: Harvard University Press.